JURNAL MANAJEMEN SOSIAL EKONOMI (DINAMIKA) VOL 6, No.2, Oktober 2026, pp. 368 - 375
p-ISSN : 2808-8786 [print]
e-ISSN : 2798-1355 [online]
http://journal.stiestekom.ac.id/index.php/dinamika page 368
DOI : https://doi.org/10.51903/dinamika.v4i2

Analisis Akuntansi Forensik, Sistem Pengendalian Internal, dan Kualitas Informasi Akuntansi terhadap Deteksi Money Laundering pada Sektor Perbankan di Indonesia

M Ramadhan Ibrahim[1], Xaperius Alberto[2], Rafif Putra Wiryamanta[3], Achmad Alfin Nahdi Fadhulloh[4], Tries Ellia Sandari[5]
[1-5]Universitas 17 Agustus 1945 surabaya
Jl. Semolowaru No.45, Menur Pumpungan, Kec. Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur 60118
m.romadhon.ibrahim9.9.1@gmail.com[1], sapriuxberto@gmail.com[2], rafifputrawiryamanta709@gmail.com[3]
achmadalfin1927@gmail.com[4], triesellia@untag-sby.ac.id[5]

ARTICLE INFO

Article history:

Received 17 Juni 2026
Recived in revised form 21 Oktober 2026
Accepted 29 Oktober 2026
Available online 30 Oktober 2026

ABSTRACT

This study aims to analyze the role of forensic accounting, internal control systems, and the quality of accounting information in detecting money laundering practices in the banking sector in Indonesia. This research employs a qualitative approach using a literature review method by examining relevant academic sources. The results indicate that forensic accounting plays a crucial role in identifying and uncovering suspicious transaction patterns through in-depth fund flow analysis. Effective internal control systems help minimize fraud risks and enhance early detection of illegal transactions. In addition, high-quality accounting information improves the accuracy and reliability of analysis. The integration of these three aspects is essential in establishing a comprehensive and effective monitoring system for detecting and preventing money laundering.

Keywords: *Forensic Accounting, Internal Control, Accounting Information, Money Laundering.*

.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran akuntansi forensik, sistem pengendalian internal, dan kualitas informasi akuntansi dalam mendeteksi praktik pencucian uang pada sektor perbankan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode tinjauan pustaka dengan mengkaji sumber-sumber akademis yang relevan. Hasilnya menunjukkan bahwa akuntansi forensik berperan penting dalam mengidentifikasi dan mengungkap pola transaksi mencurigakan melalui analisis aliran dana yang mendalam. Sistem pengendalian internal yang efektif membantu meminimalkan risiko penipuan dan meningkatkan deteksi dini transaksi ilegal. Selain itu, informasi akuntansi berkualitas tinggi meningkatkan akurasi dan keandalan analisis. Integrasi ketiga aspek tersebut sangat penting dalam membangun sistem pemantauan yang komprehensif dan efektif dalam mendeteksi dan mencegah pencucian uang.

1. PENDAHULUAN

Sektor perbankan sampai saat ini masih menjadi sasaran empuk sekaligus benteng pertahanan yang rapuh terhadap kejahatan pencucian uang. Peran vital bank dalam memproses lalu lintas dana berskala besar kerap

p-ISSN : 2808-8786 e-ISSN : 2798-1355

dieksploitasi untuk menyamarkan asal-usul uang ilegal. Tantangan ini kian pelik akibat intervensi teknologi digital. Lewat fasilitas perbankan elektronik dan aplikasi *mobile*, aliran dana kini berpindah dalam hitungan detik sehingga otoritas terkait kesulitan melacaknya. Lonjakan laporan transaksi keuangan mencurigakan yang dirilis PPATK saban tahun menjadi bukti konkret atas tren negatif ini. Salah satu strategi manipulatif yang sering terbongkar adalah pemanfaatan rekening perantara. Dana gelap akan singgah sementara di suatu rekening sebelum disebar ke jaringan rekening lain, termasuk menyalahgunakan identitas nasabah yang sama sekali tidak tahu-menahu mengenai transaksi tersebut.

Fenomena tersebut diperkuat dengan adanya kasus nyata yang terjadi di Indonesia, seperti Kasus Dana CSR Bank Indonesia – Otoritas Jasa Keuangan (2025–2026) yang melibatkan dugaan tindak pidana pencucian uang melalui pengelolaan dana bantuan sosial, serta Sindikat Pembobolan Rekening Bank (BNI) – TPPU (2025–2026) yang memanfaatkan rekening dormant untuk memindahkan dana dalam jumlah besar dalam waktu singkat. Kedua kasus ini menunjukkan bahwa masih terdapat celah dalam sistem perbankan, baik dari sisi pengawasan transaksi maupun pengendalian internal, sehingga memungkinkan terjadinya penyalahgunaan sistem untuk aktivitas ilegal.

Faktor krusial yang melatarbelakangi fenomena tersebut tidak lain adalah lemahnya sistem pengendalian internal lembaga keuangan. Fungsi monitoring terhadap anomali transaksi misalnya pemindahan dana berskala besar secara berulang maupun pergeseran likuiditas dalam tempo singkat dirasa belum sepenuhnya efektif. Kondisi tersebut mengonfirmasi hasil kajian Siregar (2023) dan Wibowo (2023) yang menggarisbawahi urgensi sistem pengendalian internal sebagai instrumen preventif terhadap praktik *fraud* perbankan. Selain aspek kontrol, efektivitas pelacakan transaksi ganjil ini juga ditopang oleh kualitas informasi akuntansi yang disajikan. Informasi yang bias atau kurang komplet berisiko tinggi mengaburkan indikasi kecurangan yang sedang berlangsung. Oleh karena itu, akurasi informasi akuntansi menjadi pilar utama agar pengawasan tidak kecolongan. Premis ini diperkuat oleh penelitian Pratama dan Lestari (2022) yang membuktikan bahwa tingginya mutu informasi akuntansi bertindak sebagai katalis dalam mengidentifikasi kejanggalan transaksi secara lebih cepat.

Di sinilah akuntansi forensik memegang kendali krusial untuk membongkar skema pencucian uang, terutama lewat pemetaan pola transaksi dan pelacakan anomali keuangan. Sayangnya, eksekusi di lapangan riil Indonesia terhitung belum berjalan maksimal. Mandeknya optimalisasi ini selaras dengan catatan Rahmawati (2024) serta Annurria dkk. (2025), yang menegaskan bahwa akuntansi forensik sebenarnya adalah senjata ampuh untuk mengendus sekaligus menguliti kecurangan melalui audit transaksi yang radikal. Lebih jauh lagi, studi dari Maharani dkk. (2024) membuktikan bahwa jika sistem pengendalian internal, akuntansi forensik, dan audit investigasi digerakkan bersamaan, dampaknya sangat masif terhadap pencegahan *fraud* perbankan. Logikanya sederhana: makin kokoh sistem kontrol internalnya dan makin tajam pisau analisis akuntansi forensiknya, maka ruang gerak pelaku kejahatan keuangan termasuk pencucian uang pasti akan menyusut. Berpijak pada seluruh potret masalah tadi, jelas bahwa sengkarut pencucian uang di dunia perbankan kita adalah perkara darurat yang butuh penanganan serius. Oleh sebab itu, riset ini krusial untuk membedah sejauh mana variabel-variabel tersebut mampu mengoptimalkan deteksi *money laundering* di Indonesia

Kecurangan (fraud) dan korupsi merupakan persoalan yang terus berkembang dan menjadi tantangan serius di berbagai sektor. Praktik ini tidak hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga menurunkan tingkat kepercayaan publik. Seiring dengan meningkatnya kompleksitas aktivitas ekonomi, kecurangan juga berkembang menjadi kejahatan yang lebih kompleks seperti pencucian uang. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan pendekatan yang komprehensif melalui penerapan akuntansi forensik dan audit investigatif yang mengintegrasikan ilmu akuntansi, auditing, dan hukum dalam mengungkap kecurangan secara sistematis.

Konsep ini sebenarnya sejalan dengan apa yang pernah diteliti oleh Annisa Sayyid (2014) bersama Rozmita Dewi Yuniarti Rozali dan Citra Ferninda Darliana (2015). Dalam kesimpulannya, mereka sepakat bahwa akuntansi forensik adalah kunci utama untuk mengendus dan membedah manipulasi berkat analisis keuangan yang mendalam serta proses pembuktian yang sistematis. Jalur pemikiran ini juga didukung oleh Aris Dianto (2023) yang menyatakan bahwa akuntansi forensik punya peran krusial dalam membongkar kedok *fraud*. Menariknya, penelitian terbaru dari Cahyaningsih dkk. (2025) memperlihatkan skema yang lebih utuh; akuntansi forensik dan sistem pengendalian internal jika digerakkan bersama-sama akan menjadi benteng

p-ISSN : 2808-8786 e-ISSN : 2798-1355

yang sangat kuat untuk melacak kecurangan. Maka, hukum sebab-akibatnya sederhana: kian serius instansi menerapkan aspek-aspek ini, kian tipis pula peluang terjadinya *fraud*, sehingga iklim keuangan yang transparan, bertanggung jawab, dan kredibel dapat benar-benar tercipta.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi Forensik

Akuntansi forensik hadir sebagai cabang ilmu yang mengintegrasikan kompetensi akuntansi, audit, dan keahlian investigasi untuk mengidentifikasi praktik kecurangan sekaligus memformulasikan bukti kuat bagi kebutuhan litigasi (proses hukum). Teori ini sejalan dengan argumentasi Tuanakotta (2019) yang menggarisbawahi bahwa urgensi akuntansi forensik terletak pada kemampuannya menganalisis transaksi secara komprehensif demi menyingkap anomali atau *fraud* yang luput dari audit konvensional. Melalui metodologi ini, pemeriksaan tidak lagi bersifat permukaan atau sekadar melihat saldo akhir. Penekanan investigasinya justru diarahkan pada rekonstruksi pola transaksi, penelusuran hubungan afiliasi antar-pihak, serta pelacakan jalur pergerakan modal yang dinilai mencurigakan.

Dalam konteks perbankan, akuntansi forensik memiliki peran penting dalam mendeteksi money laundering karena mampu mengidentifikasi transaksi yang tidak wajar, seperti transaksi berulang dalam jumlah besar atau penggunaan rekening pihak ketiga. Penelitian Rahmawati (2024) serta Annurria dkk. (2025) menunjukkan bahwa penerapan akuntansi forensik yang efektif dapat meningkatkan kemampuan dalam mendeteksi dan mengungkap praktik pencucian uang melalui analisis yang lebih detail dan investigatif.

Sistem Pengendalian Internal

Pada dasarnya, sistem pengendalian internal berfungsi sebagai jaring pengaman organisasi agar seluruh operasionalnya tetap berada di jalur yang benar. Fungsi utamanya tidak lain adalah untuk mengawal validitas laporan keuangan sekaligus menutup rapat ruang bagi praktik kecurangan. Jika mengacu pada kerangka kerja COSO (2013), sistem proteksi ini dibangun oleh lima pilar saling mengikat: mulanya dibentuk oleh lingkungan pengendalian yang kondusif, lalu diperkuat dengan penilaian risiko yang cermat, pelaksanaan aktivitas pengendalian di lapangan, peredaran informasi dan komunikasi yang lancar, serta ditutup dengan pemantauan secara berkala. Di industri perbankan, fondasi inilah yang menjadi jaminan mutlak terciptanya tata kelola yang transparan dan akuntabel.

Dalam praktiknya, sistem pengendalian internal yang kuat dapat membantu mendeteksi transaksi mencurigakan secara lebih cepat dan akurat. Penelitian Siregar (2023) dan Wibowo (2023) menyatakan bahwa lemahnya pengendalian internal menjadi salah satu penyebab utama terjadinya fraud, termasuk pencucian uang. Oleh karena itu, semakin efektif sistem pengendalian internal yang diterapkan, maka semakin besar kemampuan bank dalam mencegah dan mendeteksi money laundering.

Kualitas Informasi Akuntansi

Mutu informasi akuntansi ditentukan oleh seberapa besar kontribusinya dalam mendukung pengambilan keputusan yang tepat bagi para penggunanya. Menurut Kieso et al. (2020), agar data keuangan dinilai berkualitas, ada beberapa indikator utama yang wajib dipenuhi, yaitu relevansi, keandalan, komparabilitas (dapat dibandingkan), serta kemudahan untuk dicerna. Ketika laporan keuangan disajikan dengan baik, pembaca dapat melihat potret riil kesehatan finansial perusahaan secara gamblang, sekaligus lebih peka dalam mengidentifikasi jika ada kejanggalan atau kekeliruan data.

Di industri perbankan, akurasi dan kelengkapan informasi akuntansi memegang peran krusial dalam menyaring aktivitas keuangan yang mencurigakan. Jika data yang disajikan keliru atau bolong-bolong, analisis risiko yang dihasilkan berpotensi meleset dan memicu salah langkah. Hal ini sejalan dengan temuan Pratama dan Lestari (2022) yang menegaskan bahwa mutu informasi akuntansi yang prima berbanding lurus dengan efektivitas deteksi kecurangan. Dengan laporan yang berkualitas, pihak bank dapat dengan mudah memetakan serta mengendus kejanggalan pola transaksi, termasuk dalam memitigasi praktik pencucian uang (*money laundering*).

Deteksi Money Laundering

Praktik pencucian uang (*money laundering*) esensinya adalah upaya memanipulasi uang hasil kejahatan agar seolah-olah bersumber dari aktivitas yang legal di mata hukum. Dalam mekanismenya, kejahatan finansial

p-ISSN : 2808-8786 e-ISSN : 2798-1355

ini biasanya melibatkan tiga fase krusial: penempatan dana (*placement*), pemisahan atau pelapisan transaksi (*layering*), hingga penggabungan kembali ke dalam aset bersih (*integration*). Secara yuridis, Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 mendefinisikannya sebagai segala bentuk tindakan yang sengaja dirancang untuk menyembunyikan ataupun mengaburkan asal-usul kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana.

Deteksi money laundering adalah upaya yang dilakukan oleh lembaga keuangan untuk mengidentifikasi dan melaporkan transaksi yang mencurigakan. Penelitian Maharani dkk. (2024) menunjukkan bahwa deteksi pencucian uang dipengaruhi oleh faktor seperti akuntansi forensik, sistem pengendalian internal, dan kualitas informasi akuntansi. Dengan adanya sistem deteksi yang efektif, lembaga perbankan dapat meminimalisir risiko pencucian uang serta menjaga stabilitas sistem keuangan.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Studi ini dirancang menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode studi kepustakaan (*literature review*). Melalui pendekatan tersebut, penulis membedah dan menganalisis beragam literatur ilmiah yang relevan guna memetakan bagaimana korelasi antara akuntansi forensik, sistem pengendalian internal, serta kualitas informasi akuntansi dalam mengendus praktik *money laundering*. Metode ini sengaja dipilih karena efektif dalam menyajikan pemahaman konseptual yang komprehensif berbasis hasil riset terdahulu, tanpa mengharuskan peneliti turun langsung mengumpulkan data di lapangan. Adapun bahan baku analisis dalam penelitian ini sepenuhnya mengandalkan data sekunder, yang dihimpun dari jurnal nasional maupun internasional, buku teks, hingga regulasi hukum yang valid dan memiliki kredibilitas akademik yang kuat.

Proses pengumpulan data dalam penelitian ini mengandalkan studi dokumentasi, di mana peneliti melacak berbagai literatur pada basis data ilmiah seperti Google Scholar dan Sinta lewat kata kunci yang relevan dengan variabel yang diteliti. Setelah data terkumpul, tahapan berikutnya adalah membedah isi dokumen menggunakan metode analisis isi (content analysis). Metode ini melibatkan reduksi data untuk menyaring informasi esensial, memetakan pola, serta melihat keterkaitan antarvariabel. Demi menjamin keabsahan data yang dianalisis, peneliti menerapkan teknik triangulasi sumber dengan cara mengomparasikan beragam hasil studi terdahulu yang sejalan. Melalui pendekatan sistematis ini, diharapkan dapat ditarik sebuah konklusi yang utuh dan mendalam sekaligus memperkokoh fondasi teori mengenai upaya deteksi money laundering di industri perbankan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Akuntansi Forensik dalam Mengungkap Praktik Money Laundering

Sebagai salah satu cabang khusus, akuntansi forensik memegang peran sentral dalam membedah aliran dana ilegal guna membongkar berbagai modus fraud, tidak terkecuali praktik pencucian uang (*money laundering*) (Annurria et al., 2025a). Urgensi dari disiplin ilmu ini kian terasa di industri perbankan, mengingat lompatan teknologi digital dalam sistem pembayaran saat ini membuat pola transaksi keuangan menjadi jauh lebih rumit dan masif (Tambusai et al., n.d.-a).

Pada kasus dana Corporate Social Responsibility (CSR) yang melibatkan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, akuntansi forensik digunakan untuk mengidentifikasi penyimpangan dalam alokasi dan penggunaan dana bantuan sosial. Secara konseptual, praktik pencucian uang dalam kasus ini dapat dikategorikan dalam tahap placement dan layering, di mana dana yang berasal dari penyalahgunaan kewenangan dialihkan ke rekening tertentu, kemudian didistribusikan kembali melalui berbagai transaksi untuk menyamarkan asal-usulnya. Melalui teknik flow of funds analysis, auditor forensik mampu menelusuri jalur transaksi dari sumber awal hingga penggunaan akhir, termasuk dalam bentuk pembelian aset.(Annurria et al., 2025a)

Pendekatan digital forensic accounting juga relevan dalam mengungkap bukti elektronik, seperti riwayat transaksi perbankan dan komunikasi digital yang berkaitan dengan pengelolaan dana. Hal ini menunjukkan bahwa akuntansi forensik tidak hanya mengandalkan data keuangan konvensional, tetapi juga memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan akurasi dan kecepatan investigasi.(Tambusai et al., n.d.-a)

Pada kasus pembobolan rekening di Bank Negara Indonesia, akuntansi forensik berperan dalam mengurai transaksi yang dilakukan secara cepat dan simultan dalam jumlah besar. Pelaku memanfaatkan celah sistem dengan melakukan transfer berulang dalam waktu singkat, sehingga menciptakan pola transaksi yang kompleks. Dalam hal ini, teknik transaction pattern analysis dan anomaly detection menjadi krusial untuk

p-ISSN : 2808-8786 e-ISSN : 2798-1355

mengidentifikasi aktivitas yang menyimpang dari pola normal. Dengan demikian, akuntansi forensik berfungsi tidak hanya sebagai alat pembuktian dalam proses hukum, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam mengungkap struktur dan mekanisme pencucian uang yang semakin canggih di sektor perbankan.(Annurria et al., 2025a; Tambusai et al., n.d.-a)

Evaluasi Sistem Pengendalian Internal dalam Mencegah Transaksi Ilegal

Keberadaan sistem pengendalian internal pada dasarnya berfungsi sebagai benteng pertahanan organisasi untuk memastikan seluruh roda operasional bergulir secara efektif, efisien, dan tetap berada dalam koridor hukum. Dalam ekosistem perbankan, implementasi pengendalian ini memegang pilar krusial, terutama sebagai instrumen preventif dalam menyaring dan menyetop lalu lintas transaksi ilegal, termasuk memitigasi risiko praktik pencucian uang (Tambusai et al., n.d.-a).

Kasus CSR yang melibatkan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan menunjukkan adanya kelemahan dalam struktur pengendalian internal, khususnya dalam aspek pengawasan dan akuntabilitas. Kelemahan tersebut terlihat dari kurangnya transparansi dalam proses penyaluran dana, tidak optimalnya verifikasi terhadap pihak penerima, serta lemahnya mekanisme monitoring pasca penyaluran dana. Kondisi ini mencerminkan belum optimalnya penerapan komponen pengendalian internal seperti control environment, risk assessment, dan monitoring activities.(D. Wibowo, n.d.)

Di sisi lain, kasus pembobolan rekening di Bank Negara Indonesia menyoroti kelemahan dalam pengendalian operasional dan teknologi informasi. Keterlibatan pihak internal dalam kasus ini menunjukkan adanya kegagalan dalam pengendalian akses (access control) serta kurang efektifnya pengawasan terhadap aktivitas sistem. Selain itu, lemahnya implementasi prinsip segregation of duties memungkinkan individu tertentu memiliki kontrol yang berlebihan terhadap sistem, sehingga meningkatkan risiko terjadinya fraud.

Langkah konkret untuk menyumbat celah tersebut adalah dengan memperkokoh sistem pengendalian internal melalui adopsi audit berkelanjutan (*continuous auditing*) serta pemanfaatan instrumen pemantauan berbasis *real-time*. Selaras dengan modernisasi sistem tersebut, kompetensi sumber daya manusia juga wajib didongkrak agar mereka lebih peka dan cakap dalam memetakan risiko *fraud*. Kendati demikian, aspek teknis ini tidak akan bermakna tanpa dibarengi dengan internalisasi budaya kepatuhan (*compliance culture*) secara ajek. Tujuannya adalah untuk menumbuhkan kesadaran kolektif di setiap lini organisasi mengenai pentingnya menjaga integritas dalam tata kelola keuangan (Annurria et al., 2025a).

Pemanfaatan Informasi Akuntansi dalam Mendeteksi Transaksi Mencurigakan

Pemanfaatan informasi akuntansi dalam konteks perbankan tidak lagi terbatas pada fungsi pencatatan dan pelaporan, melainkan telah berkembang menjadi instrumen strategis dalam mendukung deteksi dini terhadap transaksi mencurigakan yang berpotensi mengandung unsur money laundering (Tambusai et al., n.d.-a). Informasi akuntansi yang dihasilkan dari sistem keuangan modern dapat dimanfaatkan secara aktif untuk mengidentifikasi pola transaksi yang tidak wajar melalui pendekatan analitis berbasis data.

Dalam kasus dana Corporate Social Responsibility (CSR) yang melibatkan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, pemanfaatan informasi akuntansi dapat dilakukan melalui analisis kesesuaian antara alokasi anggaran dan realisasi penggunaan dana. Secara operasional, data akuntansi dimanfaatkan untuk melakukan variance analysis, yaitu membandingkan antara rencana penggunaan dana dengan realisasi aktual. Ketidaksesuaian yang signifikan, seperti adanya pengalihan dana ke rekening pribadi atau penggunaan dana di luar tujuan program, dapat menjadi indikator awal adanya transaksi mencurigakan. Selain itu, informasi akuntansi juga dapat dimanfaatkan untuk melakukan link analysis guna mengidentifikasi hubungan antar rekening yang terlibat dalam aliran dana tersebut.(Tambusai et al., n.d.-a)

Dalam kasus pembobolan rekening di Bank Negara Indonesia, pemanfaatan informasi akuntansi terlihat pada penggunaan sistem untuk mendeteksi anomali transaksi secara real-time. Data transaksi dimanfaatkan untuk mengidentifikasi pola aktivitas yang menyimpang, seperti peningkatan frekuensi transaksi secara tiba-tiba, nilai transaksi yang tidak sesuai dengan profil nasabah, serta aktivasi rekening yang sebelumnya tidak aktif (dormant account). Melalui pemanfaatan teknologi data analytics, sistem informasi akuntansi dapat mengolah data historis untuk membentuk pola normal transaksi, sehingga setiap penyimpangan dapat segera terdeteksi sebagai red flag.

p-ISSN : 2808-8786 e-ISSN : 2798-1355

Optimalisasi informasi akuntansi sebenarnya dapat dikembangkan lebih jauh melalui sinkronisasi dengan sistem *Anti-Money Laundering* (AML) serta penerapan prinsip *Know Your Customer* (KYC). Lewat koridor ini, fungsi data akuntansi mengalami perluasan; tidak lagi sekadar menjadi bahan evaluasi internal, melainkan bermutasi sebagai fondasi utama dalam menyusun pelaporan transaksi keuangan mencurigakan kepada lembaga otoritas. Integrasi strategis ini membekali pihak perbankan untuk mengambil peran yang lebih ofensif dalam menekan angka pencucian uang melalui sistem pelaporan yang terstruktur, valid, dan sepenuhnya berbasis data (N. S. Wibowo et al., 2025).

Efektivitas pemanfaatan informasi akuntansi sangat bergantung pada kualitas data, integrasi sistem, serta kemampuan sumber daya manusia dalam melakukan analisis. Oleh karena itu, diperlukan penguatan infrastruktur teknologi informasi, peningkatan kompetensi analis keuangan, serta pengembangan sistem berbasis artificial intelligence untuk meningkatkan akurasi dan kecepatan deteksi. Dengan pemanfaatan yang optimal, informasi akuntansi dapat menjadi alat yang efektif dalam mendukung sistem deteksi dini terhadap praktik money laundering di sektor perbankan.(N. S. Wibowo et al., 2025)

Integrasi Sistem Pengendalian dan Akuntansi dalam Pencegahan Money Laundering

Upaya deteksi dan pencegahan pencucian uang memerlukan pendekatan yang terintegrasi antara akuntansi forensik, sistem pengendalian internal, dan informasi akuntansi. Ketiga aspek tersebut memiliki peran yang saling melengkapi dalam menciptakan sistem pengawasan yang efektif.(Tambusai et al., n.d.-b)

Dalam kasus CSR yang melibatkan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, kurangnya integrasi antara pengendalian internal dan sistem informasi menyebabkan keterlambatan dalam mendeteksi penyimpangan. Akibatnya, praktik pencucian uang baru terungkap setelah dilakukan investigasi mendalam melalui pendekatan akuntansi forensik. Hal ini menunjukkan bahwa sistem yang ada masih bersifat reaktif, bukan preventif.(Annurria et al., 2025a)

Pada kasus Bank Negara Indonesia, meskipun sistem teknologi informasi telah berkembang, kurangnya koordinasi antara unit kerja serta tidak optimalnya pemanfaatan data menyebabkan transaksi ilegal tetap dapat terjadi. Oleh karena itu, diperlukan integrasi yang lebih baik melalui pengembangan sistem berbasis big data analytics dan artificial intelligence yang mampu mengolah data dalam jumlah besar secara real-time.

Integrasi ini juga harus didukung oleh kebijakan yang komprehensif, termasuk penerapan prinsip Anti-Money Laundering (AML) dan Know Your Customer (KYC) secara konsisten. Dengan adanya sinergi antara ketiga aspek tersebut, institusi perbankan dapat meningkatkan kemampuan dalam mendeteksi, mencegah, dan mengungkap praktik pencucian uang secara lebih efektif.

Tantangan dan Dinamika Money Laundering dalam Sistem Perbankan Modern

Perkembangan teknologi dan globalisasi sistem keuangan telah meningkatkan kompleksitas dalam deteksi pencucian uang. Dalam konteks perbankan Indonesia, tantangan utama yang dihadapi meliputi meningkatnya angka dalam melakukan transaksi digital, penggunaan teknologi oleh pelaku kejahatan, serta keterlibatan pihak internal dalam praktik fraud.(Tambusai et al., n.d.-b)

Kasus CSR yang melibatkan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan menunjukkan bahwa faktor tata kelola dan integritas masih menjadi tantangan utama dalam mencegah pencucian uang. Sementara itu, kasus pembobolan rekening di Bank Negara Indonesia menyoroti risiko yang berasal dari aspek operasional dan teknologi, termasuk ancaman dari pihak internal yang memiliki akses terhadap sistem.(N. S. Wibowo et al., 2025)

Praktik penggunaan rekening pihak ketiga (nominee), transaksi berlapis (layering), serta pemanfaatan teknologi digital seperti online banking dan fintech semakin menyulitkan proses pelacakan. Hal ini menuntut adanya inovasi dalam sistem pengawasan, termasuk penggunaan teknologi seperti machine learning dan predictive analytics untuk meningkatkan akurasi deteksi. Rahayu, 2022

Tantangan juga muncul dari aspek regulasi dan koordinasi antar lembaga. Diperlukan sinergi antara institusi perbankan, otoritas pengawas, dan lembaga penegak hukum untuk menciptakan sistem yang mampu merespons secara cepat terhadap indikasi pencucian uang. Dengan demikian, upaya pencegahan dan

p-ISSN : 2808-8786 e-ISSN : 2798-1355

pemberantasan money laundering memerlukan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan.(Annurria et al., 2025b; Tambusai et al., n.d.-b)

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa praktik money laundering di sektor perbankan Indonesia masih menjadi permasalahan yang kompleks dan multidimensional. Kasus dana CSR BI–OJK serta pembobolan rekening bank menunjukkan bahwa pencucian uang dapat terjadi akibat kombinasi antara lemahnya sistem pengendalian internal, penyalahgunaan kewenangan, serta kurang optimalnya sistem deteksi dini berbasis informasi akuntansi. Dalam konteks ini, kelemahan pada aspek tata kelola dan pengawasan operasional membuka peluang bagi pelaku untuk melakukan penyamaran aliran dana melalui berbagai skema transaksi berlapis.

Penelitian ini menegaskan bahwa akuntansi forensik, sistem pengendalian internal, dan pemanfaatan informasi akuntansi memiliki peran yang saling melengkapi dalam mendeteksi dan mencegah money laundering. Akuntansi forensik berfungsi sebagai instrumen investigatif untuk mengungkap pola transaksi yang telah terjadi, sedangkan pengendalian internal dan informasi akuntansi berperan sebagai mekanisme preventif dan deteksi dini. Integrasi ketiga aspek tersebut menjadi kunci dalam membangun sistem pengawasan yang lebih komprehensif, adaptif, dan responsif terhadap dinamika kejahatan keuangan di era digital.

Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, lembaga perbankan disarankan untuk memperkuat sistem pengendalian internal melalui peningkatan efektivitas pengawasan transaksi berisiko tinggi, pengelolaan rekening dormant, serta penerapan prinsip segregation of duties secara konsisten. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi juga perlu dilakukan dengan mengembangkan sistem informasi akuntansi berbasis data analytics, machine learning, dan real-time monitoring guna meningkatkan kemampuan deteksi terhadap transaksi mencurigakan secara lebih cepat dan akurat.

Peningkatan kompetensi sumber daya manusia dalam bidang akuntansi forensik dan anti pencucian uang perlu menjadi prioritas melalui pelatihan berkelanjutan dan sertifikasi profesional. Kolaborasi antara perbankan, regulator, serta lembaga penegak hukum juga harus diperkuat dalam rangka pertukaran informasi dan percepatan proses penanganan kasus. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan sistem perbankan Indonesia mampu meningkatkan ketahanan terhadap risiko money laundering serta menjaga stabilitas dan integritas sistem keuangan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Annurria, W., Suhikmat,), & Fitriyanti, L. (2025a). PERAN AKUNTAN FORENSIK DALAM PENCEGAHAN KECURANGAN DI SEKTOR PERBANKAN. In *Jurnal Akuntansi* (Vol. 18, Number 2).

Annurria, W., Suhikmat,), & Fitriyanti, L. (2025b). PERAN AKUNTAN FORENSIK DALAM PENCEGAHAN KECURANGAN DI SEKTOR PERBANKAN. In *Jurnal Akuntansi* (Vol. 18, Number 2).

Tambusai, J. P., Maharani, E., Fitrijanti, T., & Mulyani, S. (n.d.-a). *Pengaruh Pengendalian Internal, Akuntansi Forensik, dan Audit Investigasi terhadap Pencegahan Fraud Pada Bank dalam Pengawasan BPK Ri*.

Tambusai, J. P., Maharani, E., Fitrijanti, T., & Mulyani, S. (n.d.-b). *Pengaruh Pengendalian Internal, Akuntansi Forensik, dan Audit Investigasi terhadap Pencegahan Fraud Pada Bank dalam Pengawasan BPK Ri*.

Wibowo, D. (n.d.). *Pencegahan Fraud Melalui Audit Internal dan Pengendalian Internal pada Bank Syariah Indonesia*. https://doi.org/10.29040/jiei.v9i1.8486

Wibowo, N. S., Halimatusadiah, E., & Rahmani, A. N. (2025). Pengaruh Kualitas Sistem Informasi Dan Efektivitas Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud. *Jurnal Riset Akuntansi*, 119–128. https://doi.org/10.29313/jra.v5i2.8337

p-ISSN : 2808-8786 e-ISSN : 2798-1355

Elvira Maharani, et. al. "*Pengaruh Pengendalian Internal, Akuntansi Forensik, dan Audit Investigasi terhadap Pencegahan Fraud pada Bank dalam Pengawasan BPK RI."* Jurnal Pendidikan Tambusai, Volume 8, Nomor 1, 2024, Pages 753–764.

Ninda Sri Rahayu. "*Pengaruh Kualitas Sistem Informasi Akuntansi dan Keamanan Sistem Informasi Akuntansi terhadap Pengendalian Internal Perusahaan pada Bank BJB Syariah Cabang Cirebon*." Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon, 2022.

Wanti Annurria, et. al. "*Peran Akuntan Forensik dalam Pencegahan Kecurangan di Sektor Perbankan*." *Jurnal Akuntansi*, Volume 18, Nomor 2, 2025, Pages 24–28.